
Dampak Adaptasi Iklim terhadap Perempuan di Kiribati : Perspektif Keamanan Manusia

Feiby Anna Maria Luntungan^{1*}, Nur Isdah Idris²

¹⁻² Universitas Hasanuddin, Indonesia

Email: feibyluntungan@gmail.com^{1*}, nurisdah@unhas.ac.id²

Alamat: Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 10 Tamalanrea, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Indonesia

Korespondensi penulis: feibyluntungan@gmail.com

Abstract. *The rise in sea levels caused by climate change has compelled island nations such as Kiribati to implement strategic policies, including climate adaptation, to address its impacts. This study employs a descriptive qualitative method with an analytical framework grounded in the theories of human security and ecofeminism to assess the effects of climate change adaptation strategies on women in Kiribati. Climate change has affected every aspect of human security—from economic conditions to personal safety—posing layered and disproportionate challenges for women, who often bear primary responsibility within the household. The study finds that women are not merely victims but also agents of change and drivers of climate adaptation through advocacy rooted in their lived experiences and environmental knowledge. This research underscores the importance of inclusive, participatory, and gender-just adaptation policies. Only through such approaches can climate crisis responses foster truly sustainable resilience across all sectors of society.*

Keywords: *Climate adaptation, Ecofeminism, Human security, Kiribati, Women*

Abstrak. Kenaikan permukaan air laut akibat dari perubahan iklim telah membuat negara - negara kepulauan seperti Kiribati untuk melakukan kebijakan strategis seperti adaptasi iklim dalam menangani dampak dari kenaikan permukaan air laut. Penelitian ini dilakukan melalui metode studi kualitatif deskriptif dengan menggunakan kerangka analisis teori keamanan manusia dan ekofeminisme untuk menilai dampak strategi adaptasi perubahan iklim terhadap perempuan di Kiribati. Perubahan iklim yang terjadi telah mempengaruhi setiap aspek dalam keamanan manusia dari ekonomi hingga keamanan pribadi yang sangat rentan dan memberikan dampak yang berlapis bagi perempuan sebagai penanggung jawab dalam rumah tangga. Hasil studi ini menemukan bahwa perempuan tidak hanya menjadi korban tetapi dapat menjadi agen perubahan dan penggerak dalam adaptasi iklim melalui advokasi lewat cerita dan pengalaman mereka dengan lingkungan. Studi ini menegaskan pentingnya kebijakan adaptasi yang inklusif, partisipatif, dan adil gender. Hanya dengan demikian, respons terhadap krisis iklim dapat benar-benar menciptakan ketahanan yang berkelanjutan bagi seluruh lapisan masyarakat.

Kata kunci: Adaptasi iklim, Ekofeminisme, Keamanan manusia, Kiribati, Perempuan

1. LATAR BELAKANG

Perubahan iklim merupakan isu lingkungan hidup yang pada abad ini menjadi salah satu isu dan tantangan global terbesar. Masalah mengenai lingkungan hidup tentu menjadi masalah yang perlu disadari oleh manusia, karena terkait dengan bumi, sebagai tempat keberlangsungan hidup bagi manusia. Utamanya yang menjadi penyebab dari perubahan iklim adalah ketika kadar CO₂ dan emisi gas rumah kaca meningkat, dan mengakibatkan suhu udara meningkat dan terjadinya perubahan curah hujan (Harmoni, 2005). Perubahan suhu bumi yang terjadi dipengaruhi oleh berbagai aktivitas manusia, baik secara langsung maupun tidak langsung. Ketika suhu udara di bumi meningkat atau terjadi pemanasan global. Menurut *Intergovernmental Panel on Climate Change* (IPCC) enam sektor yang

mendapat pengaruh besar akibat perubahan suhu, yaitu : 1) kenaikan permukaan air laut yang berdampak terhadap daerah pesisir ; 2) Perubahan tingkat keasaman laut ; 3) Keseimbangan ekosistem dan keanekaragaman hayati laut; 4) Sumber daya perairan dan penggurunan; 5) pertanian dan ketahanan pangan; 6) Kesehatan manusia (Karlina & Viana, 2020).

Isu perubahan iklim menjadi tantangan yang sedang dihadapi oleh berbagai negara di dunia. Kenaikan permukaan air laut menjadi salah satu dampak dari adanya perubahan iklim yang berakibat dari kenaikan suhu bumi yang membuat mencairnya es di kutub. Menurut data IPCC di tahun 2100, diperkirakan akan terjadi peningkatan air laut sebesar 15 hingga 95 centimeter. Negara - negara kepulauan ataupun negara yang memiliki garis pantai seperti Kiribati akan sangat terdampak oleh perubahan iklim sehingga Kiribati terancam tenggelam jika terus terjadi peningkatan permukaan air laut (Hanafi, 2015).

Dalam menghadapi ancaman dari perubahan iklim yang mengakibatkan pada naiknya permukaan air laut, pemerintah negara Kiribati tentu melakukan berbagai upaya untuk menghadapi ancaman dari perubahan iklim. Pemerintah Kiribati melakukan strategi seperti mitigasi, adaptasi dan relokasi (Sinaga & Yusril, 2021) . Strategi – strategi yang dilakukan tentu memiliki dampak bagi penduduk di negara tersebut.

Perubahan iklim yang terjadi memberikan dampak yang berbeda – beda bagi setiap negara, daerah, pekerjaan, kelas sosial masyarakat, pekerjaan, usia, dan jenis kelamin. Ketika terjadi bencana akibat dari perubahan iklim perempuan menjadi kelompok yang rentan. Perbandingan antara korban perempuan sangat besar dibandingkan dengan dan korban laki – laki saat terjadi bencana, yaitu 4 : 1 (Rochmayanto & Kurniasih, 2013). Strategi adaptasi yang dilakukan oleh pemerintah Kiribati akan memberikan dampak juga terhadap perempuan di Kiribati yang merupakan kelompok rentan. Dalam kondisi adaptasi akibat perubahan iklim, banyak dampak yang tentu dirasakan oleh perempuan. Perempuan yang kehidupan sehari – harinya sangat dekat dengan lingkungan alamnya, tentu akan merasakan dampak yang besar bila dirinya perlu untuk melakukan adaptasi dengan perubahan iklim yang terjadi. Dalam adaptasi tersebut terkadang perempuan akan merasakan perasaan tidak aman akibat dari perubahan – perubahan yang mungkin harus dihadapinya. Dalam artikel ini akan menjelaskan bagaimana dampak dari adaptasi iklim tersebut terhadap kehidupan perempuan di Kiribati dalam perspektif keamanan manusia.

2. KAJIAN TEORITIS

Human Security

Human security atau keamanan manusia terdapat banyak definisi berbeda dalam menjelaskannya. Definisi yang dipakai dalam menjelaskan mengenai konsep keamanan manusia disesuaikan dengan pemahaman masing – masing. Walaupun berbeda namun terdapat pendapat yang sama bahwa keamanan manusia merupakan fokus terhadap perlindungan terhadap manusia atau individu atas ancaman yang bukan hanya ancaman militer tetapi ancaman dari persoalan mengenai sosial, ekonomi dan lingkungan yang mempengaruhi kehidupan manusia atau individu (Burhanuddin, 2017).

Konsep keamanan manusia dikemukakan atau diperkenalkan pertama kali pada tahun 1994 oleh *United Nations Development Programme* (UNDP). Dalam definisi keamanan manusia menurut UNDP dapat dikatakan terdapat dua aspek utama, Yaitu “*first, safety from such chronic threats as hunger, disease and repression. Second, it means protection from sudden and hurtful disruptions in the patterns of daily life - whether in homes, in jobs or in communities*” (UNDP, 1994). *Commision on Human Security* kemudian menceritakan kembali mengenai konsep keamanan manusia, yaitu sebuah upaya untuk melindungi hak dasar dari manusia, seperti terbebas dari ancaman yang dapat mempengaruhi manusia dalam pemenuhan kebutuhannya (Kusuma, 2022).

Dua bagian utama yang dimaksudkan oleh UNDP dalam keamanan manusia adalah mengenai kebebasan. Pertama, “*freedom for want*” kebebasan terkait dengan hal – hal dasar bagi kelangsungan hidup manusia yang jika tidak tercapai akan menjadi sebuah ancaman bagi manusia. Kedua, “*freedom from Fear*” mengenai kebebasan dari ancaman terkait hidup yang aman dan damai yang bebas dari kekerasan. Dari laporan UNDP 1994, Keamanan manusia dikategorikan menjadi tujuh, yaitu:

- Keamanan ekonomi : ancaman keamanan bagi manusia yang terkait dengan penghasilan yang tetap, dan pekerjaan yang layak
- Keamanan pangan : ancaman keamanan bagi manusia terkait dengan akses dalam mendapatkan ketersediaan makanan dan pangan yang bergizi dan aman
- Keamanan Kesehatan : ancaman yang terkait dengan masalah yang dapat mengancam kesehatan manusia, seperti penyebaran penyakit dan kesulitan dalam mendapatkan fasilitas Kesehatan
- Keamanan lingkungan : ancaman terhadap manusia yang berasal dari bencana alam, ancaman terkait dengan polusi, penebangan hutan dan ketiadaan sumber daya alam.

- Keamanan pribadi: ancaman terkait dengan timbulnya rasa takut yang disebabkan oleh kekerasan yang dirasakan dari kekerasan fisik kriminalitas, penyiksaan, pelecehan dan kekerasan lainnya
- Keamanan komunitas : perlindungan yang terkait dengan identitas budaya dan hubungan sosial, serta kebebasan dari konflik antar kelompok
- Keamanan politik : ancaman yang terkait dengan tekanan dalam ranah politik, pelanggaran atas hak - hak dasar manusia, ketidakadilan dan kekuasaan militer yang bersifat otoriter.

Keamanan lingkungan menjadi salah satu aspek dari keamanan manusia. Tantangan yang terjadi terkait dengan lingkungan yang dapat mengancam keamanan manusia menunjukkan suatu pergeseran fokus keamanan yang dulunya hanya membahas mengenai keamanan tradisional yang menyangkut keamanan negara (*State – centric*), kini mulai berfokus pada keamanan yang sifatnya non – tradisional, yaitu menyangkut keamanan individu (*people -centric*) (Sayyidati, 2017). Salah satu isu lingkungan yang menjadi perhatian bagi dunia saat ini adalah mengenai perubahan iklim. Perubahan iklim merupakan ancaman yang bukan hanya berdampak pada aspek lingkungan dalam keamanan manusia, namun dampak perubahan iklim bisa kemudian meluas ke enam aspek lainnya dari keamanan manusia. Sehingga konsep keamanan manusia ini penting, dikarenakan ancaman keamanan sekarang yang lebih kompleks dan saling berkaitan (Kusuma, 2022)

Ekofeminisme

Ekofeminisme, berasal dari dua akar kata, yaitu *ecology* dan *feminism*. Ekologi merupakan studi yang fokusnya terkait dengan interaksi makhluk hidup dengan lingkungan kehidupannya. Interaksi yang membentuk suatu keterkaitan antara makhluk hidup yang kemudian membentuk ekosistem. Sedangkan feminisme dalam mendefinisikannya tidak dapat dengan satu pendapat, dikarenakan feminisme dalam pengertiannya akan berubah – ubah sesuai dengan keadaan yang menjadi dasar terjadinya Tindakan feminisme tersebut (Fahimah, 2017).

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), feminisme merupakan suatu gerakan dari wanita dalam menuntut persamaan hak antara wanita dan pria yang berasal dari gabungan pandangan atas hak mengenai kesetaraan. Yang melatarbelakangi munculnya feminisme adalah kesadaran untuk menghilangkan kesenjangan yang dialami antara perempuan dan laki – laki dalam tatanan masyarakat. Dari kedua definisi diatas

kemudian dapat memberikan pengertian bahwa ekofeminisme merupakan sebuah pandangan atau teori yang menyatakan bahwa bumi dan perempuan mendapat tekanan yang sama (Fahimah, 2017), artinya bahwa ada keterkaitan antara masalah lingkungan dan gender. Sehingga ekofeminisme bukan hanya menunjukkan mengenai feminisme melainkan memberikan pandangan mengenai ekologi.

Ekofeminisme dikenal pertama kali lewat buku Francoise d'Eaubonne yang berjudul "*Le féminisme ou la mort (1974)*" yang artinya Feminisme atau Kematian. disebutkan mengenai ketidakadilan yang dialami perempuan dan alam. Kemudian para kaum feminis juga menyepakati pemikiran dalam buku yang menjelaskan bahwa alam dan perempuan berada pada sebuah titik yang sama. Ekofeminisme semakin dikenal dan dikumandangkan ketika terjadi peristiwa Three Mile Island akibat dari perilaku manusia yang merugikan alam (Permatasari & Siswadi, 2022).

Pandangan mengenai ekofeminisme muncul juga dari Vandana Shiva. Dalam Yogiswari (2018) Shiva menyatakan ada hubungan yang erat antara penindasan terhadap perempuan dan kerusakan lingkungan. Perempuan diibaratkan sebagai alam. Perempuan makhluk ciptaan Tuhan yang dapat melahirkan generasi baru manusia, sama dengan alam juga melahirkan banyak manfaat bagi keberlangsungan hidup manusia (Yogiswari, 2018). Sehingga pelanggaran yang dilakukan terhadap alam, kemudian dikaitkan sebagai pelanggaran terhadap perempuan (Ofreneo, 2022). Dikarenakan merupakan seorang perempuan India, pandangan ekofeminisme Shiva bercorak ketimuran, dalam hal ini Shiva berpendapat bahwa kerusakan terhadap alam dan ketidakadilan terhadap perempuan disebabkan oleh pembangunan bermodel barat yang bersifat maskulin, eksploitatif dan merusak alam, sehingga bagi Shiva perlu disuarakan mengenai pembangunan yang berkelanjutan, adil, berbasis lokal dan melibatkan perempuan.

Pendapat Warren (1997) dalam Oktavian & Avrielia (2024), menyatakan bahwa untuk mencapai pembangunan berkelanjutan dan keseimbangan alam, yaitu lewat cara pelemahan sistem patriarki yang menjadi dasarnya. Ekofeminisme dalam mencapai hal tersebut memiliki beberapa strategi. Pertama, keterhubungan langsung perempuan dan lingkungan. Kedua, mengkritik sistem patriarki. Ketiga, peran aktif dari perempuan dalam Gerakan lingkungan.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif deskriptif berdasarkan data dari studi literatur yang di analisis menggunakan analisis teori keamanan manusia dan

ekofeminisme untuk menilai dampak strategi adaptasi perubahan iklim terhadap perempuan di Kiribati. Metode ini dipilih karena dapat menangkap pengalaman subjektif dan dinamika sosial yang kompleks yang dihadapi perempuan dalam konteks perubahan iklim. Data yang diperoleh melalui berbagai studi literatur yang meliputi laporan–laporan dari organisasi internasional (UNDP dan UNCTAD), serta berbagai artikel jurnal dan tesis–tesis yang terkait dengan kebijakan adaptasi perubahan iklim dan dampaknya bagi perempuan di Kiribati. Analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik analisis konten dengan mencari dan mengidentifikasi tema utama yang terkait dengan dampak adaptasi perubahan iklim terhadap kebutuhan keamanan manusia perempuan, seperti keamanan ekonomi dan kesehatan, kekerasan, dan pengambilan keputusan. Untuk memastikan validitas, dilakukan triangulasi sumber dengan cara mengonfirmasikan kebenaran suatu temuan dengan memeriksa dari sumber data yang berbeda dari berbagai sumber.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Adaptasi Iklim di Kiribati dan Kerentanan Perempuan

Daratan negara Kiribati sejak tahun 1993 dalam data IPCC telah mengalami penurunan dengan rata–rata 3,2 mm/tahunnya. Presiden Kiribati, Anote Tong pada sidang majelis umum Perserikatan Bangsa–Bangsa (PBB) ke–67 tahun 2012 menyampaikan fenomena kenaikan air laut yang dialami Kiribati merupakan ‘perkara waktu’ (Bharamanta, 2023). Presiden Anote Tong jelas mengatakan hal tersebut karena banyak data telah menunjukkan bahwa kenaikan permukaan air laut akan terus terjadi dan memang seperti itu realitas yang terjadi di Kiribati. Berdasarkan hal tersebut, Presiden Anote Tong ingin menyadarkan kepada dunia bahwa dampak perubahan iklim itu memang terjadi dan mereka memerlukan bantuan dari dunia internasional untuk melakukan adaptasi akibat perubahan iklim di Kiribati.

Terdapat tiga upaya atau strategi yang dilakukan oleh pemerintah Kiribati untuk menangani permasalahan akibat perubahan iklim, yaitu mitigasi, adaptasi, dan relokasi. Mitigasi dilakukan lewat upaya memperlambat laju dari perubahan iklim salah satu caranya dengan melakukan penurunan tingkat emisi gas rumah kaca di atmosfer. Tetapi, pada kasus Kiribati, upaya mitigasi kurang berdampak dikarenakan Kiribati sendiri hanya memiliki angka emisi gas rumah kaca yang sedikit (Dewi, 2017). Upaya adaptasi dilakukan dengan pengembangan dari berbagai cara untuk meminimalisir terjadinya kerentanan untuk melindungi manusia dan lingkungan dari ancaman perubahan iklim, caranya dengan melakukan upaya yang berbasis lokal seperti pembangunan pagar laut (Dewi, 2017).

Relokasi dilakukan dengan pemindahan penduduk dari suatu tempat ke tempat yang lain. dari ketiga strategi tersebut pemerintah Kiribati memfokuskan pada upaya adaptasi dalam menangani isu perubahan iklim ini. Upaya relokasi merupakan upaya paling terakhir yang dapat dilakukan jika semua upaya telah dilakukan (Dewi, 2017).

Beberapa kebijakan adaptasi yang dilakukan oleh pemerintah Kiribati, yaitu *Kiribati Adaptation Program* (KAP) yang dilakukan mulai tahun 2003, merupakan sebuah kebijakan pemerintah Kiribati mengenai adaptasi dalam mengatasi ancaman perubahan iklim ; *National Adaptation Program for Action* (NAPA) di tahun 2007; *Kiribati Development Plan* (KDP) di tahun 2012–2015; *National Framework for Climate Change and Climate Change Adaptation* di tahun 2013 (Sinaga & Yusril, 2021). Pemerintah Kiribati juga menyadari bahwa diperlukan strategi untuk adanya relokasi sebagai upaya terakhir dalam menangani permasalahan ini, sehingga pada masa pemerintahan Presiden Anote Tong muncul visi yang dikenal dengan “*migration with dignity*”. Sebuah kebijakan untuk migrasi yang dirancang pemerintah Kiribati dengan cara meningkatkan kemampuan dari masyarakat Kiribati khususnya kaum muda dengan tujuan agar saat melakukan migrasi ke negara–negara tetangga, para pemuda Kiribati telah mempunyai keterampilan dan pendidikan yang baik sehingga dengan mudah mereka mendapatkan pekerjaan (Sinaga & Yusril, 2021).

Dalam program *migration with dignity*, pemerintah Kiribati banyak mendapatkan bantuan dari organisasi maupun negara–negara. Organisasi yang memberikan bantuan seperti kerja sama antara *Asian Development Bank* (ADB) dan *Pacific Islands Forum Secretariat* (PIFS). Bantuan didapatkan dari negara tetangga Kiribati, yaitu Australia dan Selandia Baru. Selandia Baru memberikan bantuan dalam bentuk lapangan pekerjaan bagi 75 penduduk Kiribati setiap tahunnya lewat kebijakan *Recognised Seasonal Employer* dan *Pacific Access Countries* (PAC), namun karena persyaratan yang cukup sulit sehingga tidak mudah untuk memenuhi kuota. Bantuan lain datang dari Australia dengan fokus di bidang Pendidikan, seperti *Kiribati Australia Nursing Initiative* (KANI). Program ini telah dilakukan dari maret 2006 hingga juni 2014. Dalam Program bantuan luar negeri ini, Australia memberikan dana kepada Kiribati sebesar 20,8 Juta dolar Australia (Juita & Wardhani, 2021). Dalam program ini Australia membantu migrasi warga negara Kiribati untuk melakukan migrasi sebagai perawat dengan tujuan agar dapat ikut bersaing dalam dunia kerja global dengan keterampilan dan kualifikasi internasional yang telah mereka miliki (Juita & Wardhani, 2021) .

Dalam kebijakan mengenai adaptasi yang telah dilakukan oleh pemerintah kiribati. Perempuan Kiribati memiliki akses yang lebih kecil terhadap kebijakan tersebut. Mengenai kebijakan migrasi dalam “*Kiribati: Climate Change and Migration Relationships between Household Vulnerability, Human Mobility and Climate Change Report*” oleh Oakes et al. (2016) menyebutkan bahwa perempuan memiliki akses yang lebih sedikit dibandingkan laki-laki untuk migrasi ke luar negeri dan perempuan kurang memiliki kebebasan dalam mengambil keputusan terkait dengan migrasi yang disebabkan karena keputusan tersebut seringkali diputuskan oleh anggota keluarga laki-laki. Disebutkan bahwa persentase laki-laki yang melakukan migrasi ke luar negeri, yaitu 17% yang mana lebih banyak dari perempuan yang hanya 9%. Namun dalam program bantuan *Kiribati Australia Nursing Initiative* (KANI), keterlibatan perempuan menjadi prioritas sehingga cukup besar jumlah keterlibatan perempuan dalam program ini (Juita & Wardhani, 2021).

Adaptasi yang dilakukan oleh pemerintah dan penduduk Kiribati dalam merespons terjadinya perubahan iklim tentu akan berdampak pada kehidupan sehari – hari perempuan di Kiribati. Dampak ini akan merujuk pada akibat yang ditimbulkan dari perubahan iklim pada berbagai kehidupan penduduk khususnya perempuan di Kiribati. Akibat ini memungkinkan adanya ancaman bagi keamanan manusia, dikarenakan memengaruhi dua komponen penting yang ada dalam keamanan manusia yang disebutkan oleh UNDP, yaitu kebebasan dari ancaman dan kebebasan dalam memenuhi kebutuhan dasar (Kusuma, 2022). Keduanya dapat dikatakan sebagai dasar bagi kehidupan yang aman bagi manusia. Perubahan iklim yang terjadi kemudian akan mengganggu kehidupan manusia dan memberikan ancaman. Sehingga akan memberikan dampak bagi dimensi atau kategori dalam keamanan manusia yang memiliki hubungan saling terkait (Kusuma, 2022).

Keamanan Ekonomi

Dampak dari perubahan iklim yang terjadi memengaruhi kondisi wilayah dan sumber daya alam di Kiribati. Dalam laporan UNCTAD (2020) “*Women Producers of Kiribati and Their Participation in Inter-Island and International Trade*” dijelaskan bahwa banyak perempuan di kiribati yang bergantung dengan alam sebagai sumber sumber kehidupan mereka khususnya bagi perempuan yang tinggal di daerah pedesaan dan pulau – pulau terpencil. Dalam laporan tersebut untuk memenuhi kebutuhan ekonomi, perempuan kiribati banyak bekerja di sektor perdagangan. Perempuan Kiribati di pedesaan berdagang dengan menjual hasil usaha tradisional seperti, hasil kerajinan tangan, produk dari kelapa, ikan asap dan rokok dari daun pandanus sedangkan perempuan di kota berdagang makanan siap makan dan usaha produksi barang setengah jadi.

Ketika terjadi cuaca ekstrem atau perubahan musim yang tidak menentu akibat perubahan iklim akan berdampak pada mata pencaharian perempuan Kiribati yang bergantung dengan alam karena mereka akan kesulitan dalam mencari bahan baku untuk usaha dagangan mereka. Perempuan juga mengalami masalah lain dalam pemenuhan kebutuhan ekonominya, yaitu pembagian waktu yang sulit antara urusan pekerjaan dan usaha ekonomi yang mereka kerjakan. Ketika perubahan iklim terjadi akan semakin berat bagi perempuan membagi waktu sehingga perempuan akan merasakan beban ganda. Dalam menghadapi perubahan iklim yang berdampak pada aktivitas ekonomi, perempuan Kiribati sulit untuk bertahan dan beradaptasi, yang disebabkan oleh kurangnya akses dalam pelatihan keterampilan, modal usaha, teknologi produksi dan informasi mengenai peluang pasar atau cuaca. Akibatnya perempuan Kiribati akan rentan dengan kesulitan dalam ekonomi dan melemahkan ketahanan ekonomi rumah tangga sehingga dapat mengancam keamanan ekonomi dalam perspektif keamanan manusia.

Keamanan Lingkungan dan Tempat Tinggal

Dampak yang sangat dirasakan dari perubahan iklim adalah naiknya permukaan air laut dan abrasi pantai yang mengakibatkan penduduk Kiribati diharuskan untuk melakukan relokasi ke tempat yang aman. Hal tersebut berkaitan dengan ancaman keamanan lingkungan bagi penduduk Kiribati, sehingga mereka terpaksa harus melakukan relokasi bahkan migrasi. Relokasi yang terjadi memberikan beban yang berat bagi perempuan dalam adaptasi. Mereka akan menjadi orang pertama yang harus menyesuaikan diri dengan lingkungan baru. Dengan tanggung jawab rumah tangga perempuan harus beradaptasi dengan lingkungan yang baru. Ketika migrasi terjadi, itu adalah pilihan terakhir bagi mereka lewat kebijakan *Migration With Dignity* karena ikatan yang kuat dengan tanah dan budaya tempat mereka lahir dan tumbuh (Haughton, 2020). Dalam pandangan ekofeminisme, masalah ini bukan hanya sekedar kehilangan tempat tinggal, tetapi mereka juga akan kehilangan akar dari budaya, identitas dan jaringan sosial yang dimiliki oleh perempuan. Selain itu migrasi banyak dilakukan oleh keluarga yang cenderung memiliki ekonomi yang baik (Oakes et al., 2016).

Keamanan Kesehatan

Saat lingkungan terdampak akibat perubahan iklim, akan berdampak pula pada kesehatan dari penduduk yang akan merujuk pada ancaman terhadap keamanan kesehatan dalam perspektif keamanan manusia. layanan kesehatan, ketersediaan air bersih yang memadai, dan sanitasi yang baik merupakan hal yang penting bagi manusia untuk menunjang kehidupan manusia. Akibat dari naiknya permukaan air laut dan gelombang

pasang yang besar atau *king tide* di Kiribati, berdampak pada akses air bersih. Air laut telah mencemari air tanah dan banyak sumur yang digunakan dalam aktivitas sehari-hari. Perempuan yang memiliki tanggung jawab dalam mengelola kebutuhan rumah tangga tentu sangat terdampak dengan ini. Untuk menangani hal tersebut upaya adaptasi yang dilakukan adalah menampung air hujan di tangki dan penggunaan air desalinasi.

Upaya adaptasi yang dilakukan tentu mengalami kendala contohnya ketika tiba musim kering tidak ada air hujan yang dapat ditampung dan untuk air desalinasi dalam mendapatkannya diperlukan infrastruktur yang mahal dan pasokan terbatas (Haughton, 2020). Ketika air bersih dan sanitasi sulit untuk didapatkan akan berdampak pada kesehatan terutama bagi perempuan. Bagi perempuan kebutuhan akan air bersih sangat diperlukan karena jika kekurangan air bersih akan berdampak pada masalah Kesehatan reproduksi. Perempuan memerlukan kondisi sanitasi yang baik agar terhindar dari masalah terkait kebersihan menstruasi dan kehamilan. Penyakit lain juga, seperti diarek infeksi saluran kemih, dan masalah kulit dapat berisiko menyerang ketika air telah tercemar oleh air laut (Gaard, 2015). Tidak hanya kesehatan fisik yang akan terkena dampak, Kesehatan mental perempuan juga akan terdampak akibat dari segala tanggung jawab rumah tangga yang dimiliki. Perubahan iklim juga akan berakibat pada akses layanan kesehatan yang tidak memadai (McIver et al., 2014). Dalam menangani hal ini diperlukan sistem yang bukan hanya berkaitan dengan infrastruktur teknis tetapi diperlukan sistem yang memberikan prioritas kepada keadilan reproduksi dan kesehatan yang berbasis gender.

Keamanan Pangan

Naiknya air laut ke daratan dan masuk ke dalam tanah menyebabkan tanah menjadi tidak subur dan kemudian tidak bisa ditanami. Lahan – lahan pertanian mengalami kerusakan yang menyebabkan banyak dari keluarga – keluarga yang kehilangan makanan utama, yaitu kelapa, sukun dan pandanus. Selain itu makanan laut juga sebagai sumber protein ketersediaannya berkurang karena terjadi perubahan suhu laut dan polusi (Haughton, 2020). Dari kerentanan tersebut menimbulkan masalah seperti terjadi masalah gizi buruk. Kemudian beban dari perempuan bertambah akibat dari kerentanan ini karena perempuan dalam rumah tangga bertanggung jawab dalam kebutuhan makanan. Ini merupakan sebuah ancaman dalam keamanan manusia karena adanya kerentanan dari kebutuhan dasar manusia. perempuan kemudian perlu beradaptasi dan memanfaatkan kemampuan lokal dalam bercocok tanam. Lewat komunitas - komunitas, perempuan diajarkan untuk menanam tanaman yang tahan iklim dan membangun solidaritas bersama dalam menangani kerentanan pangan (Haughton, 2020).

Keamanan Sosial dan Komunitas

Ketika air laut naik dan mengharuskan sebuah komunitas untuk melakukan migrasi dan relokasi sebagai upaya adaptasi, menyebabkan mereka akan terpisah dari keluarga maupun komunitas mereka di tanah leluhur yang sudah membesarkan mereka. Dampaknya ikatan sosial yang sudah terjalin akan melemah. Ini membuat perempuan akan merasa kehilangan identitas mereka dan muncul perasaan tidak aman disebabkan karena kehidupan para perempuan yang bersifat kolektif, saling tolong menolong dan berjuang bersama hilang akibat kondisi yang mengharuskan mereka untuk berpisah (Haughton, 2020). Seperti dalam pandangan ekofeminisme bahwa kerusakan yang ditimbulkan oleh bencana perubahan iklim tidak hanya ada pada lingkungan fisik, namun merusak sebuah jaringan atau relasi yang telah dibangun sejak lama (Gaard, 2015).

Namun perubahan iklim yang berdampak pada keamanan komunitas kemudian mengharuskan agar perempuan yang dasarnya dekat dengan alam dalam kehidupan sehari-harinya memiliki peran lebih aktif dalam menangani perubahan iklim ini. Hal ini menunjukkan adanya perubahan relasi gender. Perempuan memiliki peran dan suara yang penting dalam advokasi iklim dan perempuan kemudian menjadi agen perubahan yang memberikan solusi kolektif khususnya dalam urusan air, makanan, pendidikan, dan komunikasi (Haughton, 2020). Artinya bahwa akibat keharusan ini maka perempuan kemudian tidak lagi hanya menjadi korban atau kelompok yang termarginalisasi, namun ketika perempuan diberi kesempatan dan ruang untuk melakukan penanganan terhadap perubahan iklim, perempuan juga dapat berpengaruh besar (Gaard, 2015).

Keamanan Pribadi dan Gender

Perubahan iklim akan berdampak bagi perempuan dalam keamanan dirinya. Perempuan akan rentan terhadap keamanan pribadi disaat situasi krisis. UNCTAD (2020) dalam laporannya *“Women Producers of Kiribati and their Participation in Inter-Island and International Trade”* menjelaskan di negara – negara pasifik, termasuk Kiribati kekerasan dalam rumah tangga menjadi meningkat saat terjadi bencana alam atau pandemi. Perempuan menjadi rentan terhadap perlakuan kekerasan seksual dari anggota keluarga laki – laki atau mendapatkan paksaan dalam melakukan hubungan seksual dari pasangan. Perempuan tidak memiliki kendali atas tubuh dan keputusannya terkait bagian reproduksi. Kebijakan *Eliminating Sexual and Gender Based Violence* (ESGBV) dimasukkan dalam program adaptasi iklim supaya kebijakan mengenai adaptasi iklim dibuat dengan pendekatan antar gender.

Perempuan juga lebih sering mengalami ketidakadilan struktural dari adaptasi. Dalam *Kiribati Adaptation Program* (KAP). Dalam kebijakan strategi juga perempuan seringkali mendapat sedikit keterlibatan dan ketimpangan untuk mengakses informasi (Mansfield, 2012). Selain itu perempuan rentan dengan beban berlapis (*triple burden*). Perempuan perlu untuk bertanggung jawab dengan rumah tangga, perempuan perlu aktif dalam komunitasnya, dan terkadang mereka perlu mencari penghasilan tambahan. Ketika terjadi perubahan iklim perempuan akan semakin sulit untuk beradaptasi (Haughton, 2020).

Agensi dan Perlawanan: Perempuan sebagai Pelaku Adaptasi dan Penjaga

Lingkungan

Walaupun perempuan – perempuan di Kiribati sangat rentan dengan dampak dari adaptasi iklim yang mereka alami, namun mereka juga memperlihatkan bagaimana peran mereka dalam menghadapi adaptasi iklim yang terjadi. Haughton (2020) dalam tesisnya memperlihatkan bagaimana perempuan-perempuan kiribati berperan aktif dalam berbagai proyek lingkungan di komunitas mereka, seperti mereka menjadi pemimpin dalam menanam pohon bakau agar mencegah abrasi, mereka mengatur pelatihan mengenai pertanian yang tahan iklim.

Mereka juga membentuk berbagai Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), seperti *Kiribati Climate Action Network (KiriCAN)* yang didirikan di tahun 2010 oleh tiga masyarakat Kiribati, dua diantaranya perempuan bernama Claire dan Pelenise. Fokus yang mereka lakukan, seperti advokasi perubahan iklim dari perspektif lokal di kiribati, melakukan edukasi dan pelatihan mengenai adaptasi perubahan iklim, serta menjadi penghubung masyarakat lokal dengan organisasi internasional. Mereka hadir dalam forum internasional mengenai perubahan iklim seperti *Conference of the Parties (COP)* dan menjadikan cerita atau pengalaman mereka sebagai alat dalam menyadarkan dunia internasional. Mereka yang akan pertama dipanggil jika ada konsultasi iklim. Selain itu terdapat juga LSM *Live and Learn* yang dipimpin oleh perempuan Kiribati bernama Pelenise. LSM ini berfokus dalam peningkatan kesadaran dan pendidikan lingkungan. Melalui itu mereka telah melakukan uji coba adaptasi iklim seperti membangun pulau-pulau terapung dan rumah tahan banjir yang memperlihatkan bahwa masyarakat lokal Kiribati dapat beradaptasi dengan risiko perubahan iklim (Haughton, 2020).

Dari berbagai aksi yang dilakukan menunjukkan bahwa perempuan dalam adaptasi iklim tidak hanya menjadi korban tapi mereka dapat menjadi penggerak karena berbagai pengetahuan lokal yang dimiliki oleh perempuan. Perempuan dapat menjadi pemimpin dan

pengambil keputusan dan pelindung ekosistem dalam menghadapi adaptasi perubahan iklim (Gaard, 2015).

Mengintegrasikan Keamanan Manusia dan Ekofeminisme dalam Adaptasi Iklim

Perempuan dari berbagai analisis aspek dalam keamanan manusia jelas mengalami kerentanan akibat dari adaptasi iklim dalam aspek keamanan ekonomi, keamanan lingkungan, keamanan kesehatan, keamanan pangan, keamanan komunitas dan keamanan pribadi

Ketika perempuan diberikan peluang ataupun ruang dalam adaptasi iklim maka perempuan tidak hanya menjadi korban tetapi dapat menjadi agen perubahan atau penggerak karena perempuan memiliki hubungan yang erat dengan lingkungannya. Sehingga dalam adaptasi iklim seharusnya tidak hanya bertujuan untuk permasalahan dalam infrastruktur dan ekonomi, tapi diperlukan fokus pada keadilan sosial dan ekologis. Sama seperti pandangan ekofeminisme Vandana Shiva yang menyatakan bahwa perlu disuarakan mengenai pembangunan yang berkelanjutan, adil, berbasis lokal dan melibatkan perempuan (Yogiswari, 2018)

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Perubahan iklim yang terjadi di negara Kiribati telah mengharuskan semua penduduk kiribati untuk melakukan berbagai upaya dalam mengatasi dampak yang ditimbulkan seperti naiknya permukaan air laut. Krisis ekologis yang terjadi ini kemudian memberikan dampak yang luas dan berlapis bagi perempuan di Kiribati. Lewat perspektif keamanan manusia dapat dilihat bahwa adaptasi yang dilakukan berdampak pada keamanan ekonomi, pangan, lingkungan, Kesehatan, komunitas, pribadi. Adaptasi yang terjadi menimbulkan kerentanan bagi perempuan karena terganggunya kestabilan ekonomi, mereka terpaksa berpindah tempat tinggal, dan kurang mendapat bagian dalam setiap program adaptasi.

Ekofeminisme hadir untuk memberikan sebuah kritikan terhadap ketidakadilan ekologis dan ketidakadilan gender dalam adaptasi yang dilakukan. Perempuan seringkali tidak memiliki ruang dan akses dalam bersuara untuk adaptasi iklim ini. Ekofeminisme juga memperlihatkan bahwa perempuan bukan hanya menjadi korban dalam adaptasi iklim ini, tetapi perempuan dapat menjadi agen perubahan penggerak sama seperti yang dilakukan oleh perempuan – perempuan Kiribati yang mendirikan LSM seperti *KiriCAN* dan *Live and Learn* sebagai sarana untuk menyuarakan dan mengedukasi mengenai perubahan iklim yang mereka hadapi.

Oleh karena itu, kebijakan mengenai adaptasi perubahan iklim di Kiribati tidak hanya berfokus pada penyelesaian kerusakan lingkungan, tetapi kebijakan yang dibuat perlu juga untuk memastikan adanya keadilan sosial dan gender agar tidak ada kaum yang termarginalisasi dalam adaptasi iklim ini.

DAFTAR REFERENSI

- Bharamanta, A. B. (2023). *Securitisasi pemerintah Kiribati dalam isu kenaikan air laut tahun 2012–2016* [Skripsi, Universitas Islam Indonesia].
- Burhanuddin, A. (2017). Studi keamanan dan isu-isu strategis global (Vol. 1, pp. 45–63). Lembaga Kajian dan Pengembangan Pendidikan, Universitas Hasanuddin.
- Dewi, P. R. K. (2017). Climate change will cause the next migrant crisis: Studi kasus Kiribati. *Jurnal PIR*, 2(1), 82.
- Fahimah, S. (2017). Ekofeminisme: Teori dan gerakan. *Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam*, 1.
- Gaard, G. (2015). Ecofeminism and climate change. *Women's Studies International Forum*, 49, 20–33. <https://doi.org/10.1016/j.wsif.2015.02.004>
- Hanafi, M. R. (2015). Climate refugee: Tantangan bagi tata kelola global. *Jurnal Transformasi Global*, 2. <https://doi.org/10.21776/jtg.v2i1.22>
- Harmoni, A. (2005). *Dampak sosial ekonomi perubahan iklim*.
- Haughton, P. (2020). *Women's climate change advocacy in Kiribati: Vulnerability, agency and storytelling* [Master's thesis, Malmö University]. <https://urn.kb.se/resolve?urn=urn%3Anbn%3Ase%3Amau%3Adiva-22287>
- Juita, D. N. S., & Wardhani, B. L. S. W. (2021). Bantuan Australia kepada Kiribati melalui Program Kiribati Australia Nursing Initiative (KANI). *Insignia Journal of International Relations*, 8(1), 1–18. <https://doi.org/10.20884/1.ins.2021.8.1.3486>
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. (2025, Mei 15). *Kamus versi online/daring (Dalam Jaringan)*. <https://kbbi.web.id/didik>
- Karlina, W. R., & Viana, A. S. (2020). Pengaruh naiknya permukaan air laut terhadap perubahan garis pangkal pantai akibat perubahan iklim. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 6(2). <https://doi.org/10.23887/jkh.v6i2.28203>
- Kusuma, A. S. (2022). Human security dalam hubungan internasional: Sebuah pengantar. In *Human Security dalam Hubungan Internasional*. <https://www.researchgate.net/publication/358929457>
- Mansfield, H. A. H. K. (2012). *Discourses of vulnerability: Kiribati, I-Kiribati women and forced migration due to climate change* [Master's thesis, Victoria University of Wellington].

- McIver, L., Woodward, A., Davies, S., Tibwe, T., & Iddings, S. (2014). Assessment of the health impacts of climate change in Kiribati. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 11(5), 5224–5240. <https://doi.org/10.3390/ijerph110505224>
- Oakes, R., Milan, A., & Campbell, J. (2016). *Kiribati: Climate change and migration relationships between household vulnerability, human mobility and climate change report*.
- Ofreneo, R. P. (2022). Marxisme dan ekofeminisme pada era perubahan iklim: Konvergensi dan divergensi. *Jurnal IndoPROGRESS (JIP)*, 3(1), 43.
- Oktavian, R., & Avrielia, T. (2024). Ekofeminisme dan kontribusi perempuan dalam transformasi iklim pada Forum G-20 di Indonesia. *Sospol: Jurnal Sosial Politik*, 10(2), 186–198. <https://doi.org/10.22219/jurnalsospol.v10i2.37556>
- Permatasari, Rr. Y. A., & Siswadi, G. A. (2022). Ekofeminisme di Indonesia: Sebuah kajian reflektif atas peran perempuan terhadap lingkungan. *Purwadita: Jurnal Agama dan Budaya*, 6(1), 59–70. <https://doi.org/10.55115/purwadita.v6i1>
- Rochmayanto, Y., & Kurniasih, P. (2013). The role of gender on climate change adaptation in the mountainous ecosystem at Solok District, West Sumatera. *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan*, 10(3), 203–213. <https://doi.org/10.20886/jakk.2013.10.3.203-213>
- Sayyidati, A. (2017). Isu pemanasan global dalam pergeseran paradigma keamanan pada studi hubungan internasional. *Jurnal Hubungan Internasional*, 6(1). <https://doi.org/10.18196/hi.61103>
- Sinaga, M., & Yusril. (2021). Dampak perubahan iklim di Pasifik Selatan: Ancaman naiknya permukaan air laut terhadap eksistensi negara dan penduduk Kiribati. *Papua Journal of Diplomacy and International Relations*, 1(1), 29–43. <https://doi.org/10.31957/pjdir.v1i1.1672>
- UNCTAD. (2020). *Women producers of Kiribati and their participation in inter-island and international trade*. United Nations.
- UNDP. (1994). *Human development report 1994*. Oxford University Press.
- Yogiswari, K. S. (2018). Corak budaya patriarki dalam perkembangan ilmu dan teknologi: Perspektif ekofeminisme Vandana Shiva. *Jurnal Sanjiwani*, 9(2).